

DISERTASI

KEUANGAN INKLUSIF, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

*FINANCIAL INCLUSION, ECONOMIC GROWTH AND
POVERTY IN EASTERN INDONESIA*

ELY STEVEN INGRATUBUN



PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



Optimization Software:
www.balesio.com

DISERTASI

KEUANGAN INKLUSIF, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

FINANCIAL INCLUSION, ECONOMIC GROWTH AND POVERTY IN EASTERN INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

disusun dan diajukan oleh

ELY STEVEN INGRATUBUN
P0500315006



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



DISERTASI

KEUANGAN INKLUSIF, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

ELY STEVEN INGRATUBUN
P0500315006

telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi
pada tanggal **29 April 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Tim Promotor,

[Signature]
Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA
Promotor

[Signature]
Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
Kopromotor I

[Signature]
Dr. Paulus Uppun, SE., MA
Kopromotor II

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

[Signature]
wanto Anwar, SE., MA

[Signature]
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Steven Ingratubun
NIM : P0500315006
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

KEUANGAN INKLUSIF, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,2019

Yang membuat pernyataan,



Ely Steven Ingratubun



PRAKATA

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas pertolongannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini merupakan prasyarat untuk mencapai gelar Doktor (Dr) pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan permasalahan yang dihadapi selama proses perkuliahan, konsultasi dengan supervised dan penelitian hingga penulisan Disertasi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik para dosen, pimpinan, kolega, rekan-rekan se-angkatan, sahabat dan keluarga. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, substansi keilmuan, maupun materil secara langsung maupun tidak langsung hingga selainya Disertasi ini. Rasa penghargaan dan terima kasih yang tinggi penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Anas Iswanto Anwar Makatutu, SE.,MA atas motivasi, arahan, bimbingan dan kemudahan yang diberikan dalam proses penyelesaian studi program Doktor Ilmu Ekonomi.
3. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Promotor Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA; Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.Ph.D sebagai Kopromotor I; dan Dr. Paulus Uppun, SE., MA sebagai Kopromotor II atas segala curahan ilmu, arahan, motivasi dan bimbingan serta perhatian tiada henti kepada penulis dalam penyelesaian Disertasi ini.
4. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Stellamaris Metekohy, SE., M.Si sebagai penguji eksternal atas bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk memberikan masukan bagi penulis serta memotivasi penulis dalam penyelesaian studi.



5. Ucapan terima kasih yang sama kepada tim penguji, juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, SE., MA; Prof Dr. I. Made Benyamin, SE., M.Ec; Dr. Madris, DPS., SE., M.Si; Dr. Agussalim, SE., M.Si; Dr. Anas Iswanto Anwar Makatutu.,SE.,MA atas semua saran dan kritik yang membangun kesempurnaan penelitian Disertasi ini, sejak awal usulan penelitian hingga selesainya Disertasi ini.
6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penasehat akademik Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA, adalah inspiratori dengan begitu banyak nasihat, arahan dan perhatian penuh bahkan menjadi dewa penyelamat disaat penulis mengalami kesulitan akademik yang sangat krusial dalam mengakhiri proses penyelesaian studi program doctor di bidang Ilmu Ekonomi.
7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada mantan Dekan FEB Unhas Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE. M.S.Ak dan mantan KPS program Doktor Ilmu Ekonomi Prof. Dr. Haris Maupa, SE.M.Si masa periode 2014-2017, atas segala perhatian dalam bentuk memotivasi yang diberikan selama perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kemenristek dan Pendidikan Tinggi RI dan staf atas segala bantuan dan kepedulian kepada penulis berupa beasiswa BPPDN selama empat tahun telah dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh penulis dalam proses penyelesaian studi program Doktor Ilmu Ekonomi tepat 3 tahun 8 bulan di pascasarjana FEB Unhas.
9. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada Ketua Yayasan Muhammad Thaha Tual. Ny. Hj. Samsiah Ingratubun, S.Pd.I., M.Si, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi program doktor (S3) di Universitas Hasanuddin Makassar..
10. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) UMEL Tual Dr. H. Muhammad Husni Ingratubun, SE.SH.MM.MH beserta staf dosen dan pegawai, atas kepercayaan dan kepeduliannya terhadap peningkatan sumber daya dosen sehingga memberikan rekomendasi untuk melanjutkan studi program Doktor Ilmu
Ekonomi.



11. Terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada paman, abang, kakak dalam deretan barisan Umel Ohoi Ohoiwait antara lain: Drs. Octovianus Ingratoeboen, M.Si (alm) dan istri, Herman Adrian Koedoeboen, SH.M.Si dan istri, Dr. Zainudin Notanubun, M.Pd dan istri, Drs. Abdul Hamid Ingratubun, M.Si dan istri, Edison Richard Koedoeboen, SE.MM dan istri, Drs. Noch Koedoeboen dan istri, Ir. Hendrik Koedoeboen, MM.M.Si dan istri, Ayub Notanubun, SH.M.Si dan istri atas segala bantuan dan motivasi dalam menyemangati penulis pada studi program Doktor Ilmu Ekonomi.
12. Terima kasih kepada yang tercinta kedua orang tua ku : Bapak Abner Ingratubun purnawirawan TNI-AD (alm) dan Ibu Domina Hukubun, BA, beserta kakak beradik, Mariam Sinai/Ingratubun dan keluarga, Lisye Notanubun/Ingratubun dan keluarga, Yacob Ingratubun (alm), James Rahajaan dan keluarga, Oktavina Hukubun/Ingratubun dan keluarga, Marci Taebenu/Ingratubun dan keluarga, Olivia Fonataba/Ingratubun dan keluarga.
13. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Eliezer Rahajaan (alm) beserta anak cucu, atas semua didikan dan nasihat yang diberikan sejak kecil sampai saat ini, masih tetap melekat dalam ingatan penulis.
14. Terima kasih kepada yang tersayang istri tercinta Lely Fomas Koedoeboen, SKM, dan anak Theo Julius Suryo, Jones Juan Dani, dan Anglis Kormas Mell yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah proses studi, baik dalam susah maupun senang. Doa, dukungan moriil materiil serta cinta dan kasih sayang kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan sampai mencapai puncak akhir studi Doktor Ilmu Ekonomi.
15. Terima kasih kepada ipar Johan Elon Koedoeboen dan keluarga, Refeldus Koedoeboen dan keluarga, Karel Koedoeboen dan keluarga beserta adik-adik ipar maupun mertua Lisbet Koedoeboen/Rahajaan yang senantiasa menyertai penulis dengan doa dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan moril bahkan meteril bagi penulis dari awal sampai dengan penyelesaian studi akhir.
16. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Pemerintahan Ohoi Ohoiwait, Majelis Jemaat Elim Ohoiwait dan kepala (Rahayaan, Rahaningmas, Koedoeboen, Ingratubun dan Notanubun) atas dukungan doa maupun motivasi yang diberikan.



17. Teman-teman se-angkatan 2015 (program studi doktor ilmu ekonomi) antara lain Bapak Jimmy Roland Alfius Torar, Bapak Abdul Rasyid, Ibu Maryanti, Bapak Muh. Thoha, Bapak Wilhalminus Sombolayuk, Bapak Kafrawi Yunus, Bapak Akhsan Tenrisau, Bapak Badirun Basri, Bapak Umar Syarifuddin, Bapak Tasrim, Bapak Moh. Hasbi, Bapak Andi Harmoko, Bapak Muh. Irfai Sohilauw, Bapak Nasir Tonna, Ibu Sri Sundari, Ibu Ira, Ibu Nina Fapari, Ibu Rosdiana, Ibu Pipi, dan Ibu Hasnidar, terima kasih atas dukungan moril yang telah diberikan selama ini. Disertasi ini akan sulit diselesaikan tanpa dukungan dari kalian semua.
18. Bagi teman-teman Angkatan 2016, 2017, dan 2018, beserta Himpunan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dedikasi yang diberikan selama ini.
19. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada Sdr. Rein J. Wekan, SE., M.Si, atas bantuan tenaga dan pikiran yang diberikan bagi penyelesaian penulisan Disertasi ini.
20. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada Dr. William G. M. Louhenapessy, SE., M.Si, Dr. Elsin Aponno, SE., M.Si, Dr. Zany I. Aunalal, SE., M.Sc, dan Dr. Wilhelmus Renyaan, SH., MH atas semua kebersamaan yang terjalin selama ini.
21. Seluruh dosen dan staf dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih atas bantuan, motivasi dan dukungan moril yang telah diberikan selama ini. Tanpa dukungan bapak dan ibu, Disertasi ini akan sulit untuk diselesaikan.
22. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua budi baik dan dukungan yang diberikan.

Semoga Disertasi ini bermanfaat dalam nuansa pengembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya akademik ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menolong dan membantu kita dalam beraktivitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi kepada banyak orang yang membutuhkan.

Makassar, April 2019

Ely Steven Ingratubun



ABSTRAK

ELY STEVEN INGRATUBUN. *Keuangan Inklusif, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia* (dibimbing oleh Basri Hasanuddin, Muhammad Yusri Zamhuri, dan Paulus Uppun).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh keuangan inklusif, baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan dan (2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini menggunakan *simultaneous equation model* (SEM) untuk meregresi hubungan kausalitas antara keuangan inklusif melalui pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta melalui ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data panel pada tahun 2008 sampai dengan 2017.

Temuan studi menunjukkan bahwa (1) keuangan inklusif dan investasi swasta melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara signifikan berpengaruh positif, sedangkan keuangan inklusif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (2) investasi swasta dan keuangan inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan; dan (3) penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Kata kunci: keuangan inklusif, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia



ABSTRACT

ELY STEVEN INGRATUBUN. *The Inclusive Finance, Economic Growth, and Poverty in East Indonesia Regions* (supervised by **Basri Hasanuddin, Muhammad Yusri Zamhuri, and Paulus Uppun**)

This research aimed to investigate (1) the influence of inclusive finance, either directly or indirectly through the economic growth, the absorption of the labor power, and the imbalance of income towards the poverties, and the influence of economic growth on the poverties, either directly or indirectly through the absorption of the labor power.

The research used the Simultaneous Equation Model (SEM) in order to regression causality correlation between the inclusive finance through the economic growth and the private investment through the income imbalance, the absorption of labor power towards the poverties using the secondary data and panel data in 2008 through 2017.

The study results indicated that (1) the inclusive finance and private investment through the significant economic growth and labor absorption had a positive effect, while the inclusive finance had insignificant influence on the income imbalance; (2) The private investment and the inclusive finance through economic growth, the absorption of the labor power as well as the income imbalance significantly had a positive influence on the poverties, while the economic growth had no an insignificant influence on the poverties, (3) the absorption of the labor power and the income imbalance significantly had a positive influence of the poverties.

Keywords: *inclusive finance, economic growth, poverties in East Indonesia Regions*



Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Pokok Penelitian	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kajian dan Landasan Teoritis	26
1. Hubungan Teoritis Keuangan Inklusif dan Kemiskinan	26
2. Dimensi Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi	30
3. Hubungan Teoritis Investasi Swasta dan Kemiskinan	45
4. Hubungan Teoritis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	52
5. Hubungan Teoritis Penyerapan Tenaga Kerja dan Kemiskinan	71



6. Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan	77
7. Hubungan Teoritis Kemiskinan antara Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi	98
B. Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya	120
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	128
A. Kerangka Konseptual Penelitian	128
B. Hipotesis Penelitian	132
BAB IV METODE PENELITIAN	136
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	136
B. Jenis dan Sumber Data	138
C. Teknik Pengumpulan Data	139
D. Metode Analisis Data dan Teknik Analisis Penelitian	139
E. Definisi Operasional Variabel	143
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN	145
A. Gambaran Umum Perekonomian dan Kemiskinan di KTI	145
B. Statistik Deskriptif	155
C. Hasil Estimasi Pengaruh Keuangan Inklusif, Investasi Swasta dan Kemiskinan di KTI	169
1. Pengaruh Langsung Keuangan Inklusif dan Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di KTI	169
2. Pengaruh Langsung Keuangan Inklusif dan Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di KTI	170



3. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Investasi Swasta dan Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di KTI	171
4. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Investasi Swasta dan Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di KTI	172
BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	173
A. Analisis dan Implikasi Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kemiskinan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	173
B. Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Ketimpangan Pendapatan	181
C. Analisis dan Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Penyerapan Tenaga Kerja dan Ketimpangan Pendapatan	186
D. Analisis dan Implikasi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Baik Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan	189
E. Analisis dan Implikasi Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Baik Langsung maupun Tidak Langsung	192
BAB VII PENUTUP	195
Kesimpulan	195
Saran	201



DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN	220



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Peta Penelitian Terdahulu	120
Tabel 5.1 Perkembangan Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Keuangan Inklusif, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2008-2017	149
Tabel 5.2 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi Tingkat Provinsi di KTI	152
Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel yang Diestimasi	155
Tabel 5.4 Hasil Pengujian Kecocokan Model (<i>Goodness of Fit Model</i>)	159
Tabel 5.5 Hasil Regresi <i>Direct Effect</i> Variabel-Variabel yang Diteliti	160
Tabel 5.6 Hasil Regresi <i>Indirect Effect</i> Variabel-Variabel yang Diteliti	166
Tabel 5.7 Hasil Regresi Direct Effect dan Indirect Effect (<i>Total Effect</i>)	168



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	131
Gambar 4.1 Kerangka Model Analisis	142
Gambar 5.1 Kerangka Model Analisis Hasil Penelitian	165



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian	220
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	223
Lampiran 3 Pengujian Variabel X1, X2 Terhadap Y1,Y2,Y3,Y4	224
Lampiran 4 Pengujian Kriterion Statistik (Pengaruh X1, X2 Terhadap Y1,Y2,Y3,Y4)	230
Lampiran 5 Persamaan <i>Reduced Form</i> (Y1,Y2,Y3,Y4)	234



BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan utama bab ini adalah untuk memberikan gambaran dan argumentasi awal tentang mengapa studi ini penting untuk dilakukan. Untuk itu, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah pokok penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan selalu mewarnai perjalanan panjang sejarah Indonesia. Sejak kedatangan bangsa kolonial penjajah, rakyat Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh gambaran kemiskinan. Rakyat Indonesia hidup serba kekurangan di tengah berkelimpahan kekayaan hayati alam Indonesia. Bahkan, setelah bangsa Indonesia merdeka pun, sebagian masyarakat Indonesia belum bisa terlepas dari jurang kemiskinan. Kemiskinan seolah-olah menjadi musuh dari setiap rezim pemerintahan.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Pada dasarnya berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan. Namun masalah kemiskinan masih tetap melilit masyarakat dalam lingkaran kemiskinan yang tidak kunjung selesai.

Kemiskinan adalah bahagian dari peradaban umat manusia. Seseorang miskin bukanlah kesalahan dan ketidakmampuan yang bersangkutan,



akan tetapi adalah bahagian sebuah kesalahan dari lingkungan atau masyarakat sendiri. Ia miskin karena masyarakat lingkungannya tidak pernah memberi peluang kesempatan kepada kaum miskin untuk mengentaskan diri dan keluarganya dari lembah kemiskinan. Kaum miskin menjadi korban dari sebuah cara pandang yang keliru karena menggunakan kacamata “miopia”, yang bahkan hanya mampu memahami kemiskinan sebatas kulit luarnya saja. Maka terwujudlah berbagai program, yang kalau tidak berbasis pada teori ekonomi makro, akan lebih terfokus pada kebijakan dan perencanaan yang berskenario sentralistik, dengan asumsi yang sangat umum. Hasilnya tentu saja tidak mengherankan apabila pada akhirnya jauh dari menyelesaikan masalah (Muhammad Yunus, 1996).

Pandangan Amartya Sen's (1999) menyatakan, bahwa dalam memandang kesejahteraan individu, kita harus mempertimbangkan tidak hanya apa yang mereka capai untuk diri mereka sendiri (pencapaian kesejahteraan) dengan kata lain, fungsi aktual mereka, tetapi juga apa yang bebas mereka raih. Kita harus menilai kebebasan ini dalam hal apa yang terbuka bagi mereka, baik dalam hal kesejahteraan mereka sendiri dan nilai-nilai aktual mereka, termasuk nilai-nilai mereka untuk orang lain. Kategori kemampuan utamanya adalah kebebasan kesejahteraan, yang mencerminkan fungsi-fungsi yang dapat diperoleh seseorang.

Berbagai macam definisi kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan oleh pemerhati kemiskinan. Bank Dunia (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Menurut

Sen (1999), kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup



seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata.

Dalam prakteknya Sen tampaknya sering menggunakan peringkat, ketika membandingkan ruang untuk mengukur pengembangan dan kesetaraan: (1) kemampuan, rangkaian opsi kehidupan yang dapat dipilih seseorang, ditempatkan pertama karena prioritas diberikan untuk kebebasan; (2) fungsi, atau bagaimana seseorang benar-benar hidup; (3) utilitas, yang berarti perasaan puas atau fakta pemenuhan preferensi peringkat relatif rendah karena preferensi dapat dibentuk tanpa banyak refleksi atau terbentuk dalam situasi kekurangan informasi atau pilihan; dan (4) barang/komoditas, mungkin ditempatkan terakhir sebagai ukuran kesejahteraan karena orang memiliki persyaratan yang berbeda. Kita bisa membaca prioritas normatif yang diberikan kepada kemampuan sebagai aturan evaluatif bahwa kemampuan lebih penting dari pada fungsi.

Kemiskinan merupakan penyakit sosial dan musuh besar yang harus dihadapi bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok tidak sanggup memelihara dirinya sendiri ataupun kelompoknya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan potensi tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Sumarto, 2010).

Kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan



sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Disebutkan bahwa sedikitnya tercatat sebanyak 767 juta orang hidup di bawah garis internasional kemiskinan. Dimana mereka mencukupi kebutuhannya dengan pengeluaran USD1,90 per hari atau sekitar Rp 25.000 per harinya. Hampir 11 orang dari setiap orang di dunia atau 10,7 persen dari total populasi global berada di bawah garis kemiskinan yang paling dalam. Jumlah orang miskin paling banyak berada di wilayah sub-sahara Afrika di mana mencapai 388,7 juta orang. Sedangkan kedua, ada di Asia bagian Selatan di mana mencapai 256,2 juta orang. Asia bagian timur dan pasifik menjadi peringkat ketiga di mana mencapai 71 juta orang disusul Amerika Latin dan Karibia yang tercatat sebanyak 33,6 juta orang. Adapun bagian Eropa dan Asia Tengah tercatat yang paling rendah di mana sebanyak 10,8 juta. (The World Bank, 2017).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (2007) secara resmi mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin turun 2,13 juta jiwa dibandingkan dengan tahun dari yang awalnya 39,3 juta jiwa menjadi 37,17 juta jiwa atau dari 17,75 persen menjadi 16,58 persen. Jadi secara hitungan matematis angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2006 ke tahun 2007 memang mengalami penurunan. Berpatokan data BPS (2007), bahwa angka pengangguran pun tahun 2007 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2006. Tercatat pada tahun 2006 jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,93 juta jiwa atau 10,28 persen dari total angkatan kerja dan turun menjadi 10,55 juta jiwa atau 9,75 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2007. Perbaikan ini pun tidak

tan berhasil karena masih jauh dari target yang diharapkan.



BPS (2017) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 10,12 persen, apabila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 10,7 persen, terjadi selisih kenaikan jumlah penduduk miskin 9 persen dalam satu tahun. Sedangkan angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 94,67 persen. Problematika angkatan kerja pun masih jauh dari target apabila dibandingkan laju angka pengangguran semakin tinggi. Hal ini, berimplikasi pada kebijakan pemerintah yang tidak berenergis dengan pemilik modal atau investor luar untuk menanamkan modal di negara dan daerah.

Dengan demikian angka pengangguran sangat berkaitan dengan angka kemiskinan. Angka pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan angka kemiskinan ketika pengangguran meningkat maka angka kemiskinan pun akan ikut meningkat. Hal yang bisa menjadi analisis adalah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka akan menyerap tenaga kerja sebanyak 400.000 jiwa. Di sisi lain, penambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya adalah berkisar 2,5 juta jiwa. Dengan kata lain untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal harus tumbuh sekitar 6,25 persen.

Fenomena keuangan inklusif terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa persentase masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal sebesar 35,95 persen. Persentase menabung sebesar 26,56 persen dan persentase meminjam dari lembaga keuangan formal sebesar 13,3 persen. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand (*Global Findex 2014*, diolah).

Menyimak keuangan inklusif dan investasi swasta sebagai mesin pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), apabila dapat secara maksimal, terstruktur dalam perencanaan tiap-tiap daerah



provinsi, sudah tentu akan menurunkan tingkat kemiskinan di KTI. Hal ini membutuhkan peran pemerintah pusat dan daerah provinsi dari sisi pengeluaran dan stabilitas iklim perbankan, memudahkan kecenderungan investasi swasta dalam berinvestasi di daerah, otomatis tercipta pembukaan lapangan kerja baru disitulah terjadi penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pergeseran *gini rasio* (ketimpangan) berbanding lurus menurunkan tingkat kemiskinan di KTI. Pada titik awal hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah fungsi produksi agregat sebagai awalnya dikembangkan oleh Robert Sollow (Blanchard, 2000). Model merupakan hubungan antara agregatif output dan input dalam produksi.

Peran investasi swasta dalam bentuk penanaman modal sangat menentukan kemajuan ekonomi daerah dari aspek *demand side* (sisi permintaan) dan *supply side* (sisi penawaran) di sektor penyerapan tenaga kerja dengan standar upah, merubah pola ekonomi *income per capita* masyarakat daerah setempat, *gini rasio* (ketimpangan) semakin rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berdampak positif dalam mereduksi kemiskinan. Teori Investasi Neo-Klasik menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB riil berpengaruh positif terhadap investasi swasta (Wai and Wong, 1982; Greene dan Villanueva, 1991; Fielding, 1997). Hal ini juga dikenal sebagai “efek akselerator” (Ouattara, 2000). Selain itu, nilai modal yang diinginkan oleh sebuah perusahaan berpengaruh secara positif pada tingkat permintaan (Bayai dan Nyangara, 2013).

Fenomena kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara berkembang

ng countries), termasuk Indonesia, terlebih khusus provinsi-provinsi
ada di Kawasan Timur Indonesia, sejak lama menjadi pusat perhatian



para ahli ekonomi dan sosial. Perhatian tersebut menjadi kian intensif setelah ditemukannya fakta bahwa di berbagai belahan dunia, sejumlah negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama satu-dua dekade, akan tetapi pertumbuhan tersebut ternyata tidak serta merta mereduksi angka kemiskinan.

Issue keuangan inklusif, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di KTI merupakan fenomena pembangunan untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam tentang *problem solving* (pemecahan masalah) apa terhadap kondisi perekonomian daerah dan keuangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di daerah-daerah yang merupakan variabel preditor. Keuangan inklusif memainkan peran yang sangat strategis untuk menurunkan angka kemiskinan lewat pelbagai peluang yang dapat seperti penyaluran kredit usaha mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha di sektor-sektor ekonomi guna meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat miskin dan tumbuhnya ekonomi kerakyatan di sektor usaha mikro kecil menengah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi stabil.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan hingga Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2016, maka selama enam bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 6,9 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 188,19 ribu, sedangkan daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 181,29 ribu orang. Kemiskinan paling banyak di pulau Jawa mencapai 14,79 juta disusul penduduk Sumatera yang mencapai 6,23 juta. Bali dan Nusa Tenggara tercatat 2,12 juta



sama dengan Sulawesi. Sedangkan Maluku dan Papua tercatat 1,52 juta penduduk dan 0,99 juta terdapat di Kalimantan.

Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Khasnabis dan Mavrotas (2008) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi. Beberapa penelitian lain juga menekankan pentingnya keterkaitan antara penguatan sektor keuangan dan penurunan kemiskinan, misalnya studi oleh Beck *et al* (2004), Green *et al* (2006), Honohan (2004), dan Claessen dan Feijen (2006). Ahmad dan Malik (2009) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem keuangan dapat menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Levina, 1997).

Problematika kemiskinan yang terjadi di Indonesia tak kunjung selesai

periode waktu tertentu, tetapi sepanjang laju pertumbuhan penduduk
a berkembang terus menerus setiap tahun, otomatis angka kemiskinan



pun tetap ada dan itu terjadi di daerah yang lambat tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran tinggi, penyerapan tenaga kerja menurun, karena sempitnya lapangan kerja mengakibatkan lesunya iklim investasi untuk penanaman modal di daerah, tentu akan menimbulkan ketimpangan pendapatan sangat tinggi khususnya yang terjadi pada wilayah (Agussalim, 2009) .

Kotze (2004) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah, ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil, dalam hal ini keuangan inklusif akan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Keuangan inklusif dalam institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya keuangan untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah-daerah, khususnya pada wilayah-wilayah pinggiran yang terisolasi dari segi pembangunan ekonomi daerah di KTI.

Menurut pandangan Demirgüç-Kunt *et al* (2008) dan Klapper (2012) menyatakan bahwa, ada tiga poin yang telah menghubungkan inklusi keuangan yaitu akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan. Berdasarkan ketiga

tersebut, maka penelitian ini mendefinisikan inklusi keuangan sebagai untuk memastikan akses masyarakat miskin sebagai kelompok yang



termarginalkan terhadap berbagai jasa sistem keuangan. Untuk dapat memberikan gambaran lebih baik mengenai pengukuran keuangan inklusif, maka penelitian ini juga mencoba untuk mengkuantifikasi dan berfokus pada masyarakat miskin sebagai target utama keuangan inklusif dan lebih dari sekedar perkembangan keuangan yang diharapkan untuk tetap stabil.

Pada saat ini, keuangan inklusif sejauh mana mempengaruhi peluang ekonomi seseorang ditentukan oleh keterampilan individu, inisiatif, status sosial dan koneksi politik. Sistem keuangan mempengaruhi kemampuan individu untuk memulai bisnis dan biaya pendidikan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mewujudkan tujuan ekonomi mereka sehingga membentuk kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan sejauhmana ketimpangan itu akan bertahan dari generasi ke generasi. Dengan adanya distribusi, modal berpengaruh terhadap keuangan sehingga perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan permintaan tenaga kerja bertambah, berimplikasi terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan (Demirguc-Kunt dan Levine, 2009).

Keuangan inklusif juga sebagai perpanjangan tangan sektor perbankan dan didefinisikan secara luas sebagai proses layanan keuangan yang diperlukan, untuk harga adil, alokasi tepat, dan waktu tanpa diskriminasi terhadap anggota masyarakat (Sarma dan Pais, 2011).

Tujuan keuangan inklusif memberikan manfaat kepada banyak orang miskin yang tidak menggunakan jasa keuangan formal. Keuangan inklusif adalah strategi intervensi yang berusaha mengatasi friksi pasar untuk beroperasi demi orang miskin yang tidak mampu. Jadi keuangan inklusif

memberikan solusi tambahan dan komplementer dalam mengatasi kemiskinan, mempromosikan pembangunan inklusif dan pola menangani MDGs



(Sarma, 2010). Hal ini bertujuan untuk menarik populasi yang tidak memiliki rekening bank ke dalam sistem keuangan formal sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses layanan keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, transfer, kredit dan asuransi.

Di Indonesia, menurut Bank Dunia (2010) bahwa secara nasional akses ke sistem keuangan formal hanya menjangkau sekitar 52% dari total jumlah penduduk. Di sisi lain, terdapat 31% penduduk mengakses keuangan informal dan 17% penduduk yang mengalami keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan). Masih menurut Bank Dunia (2010), bahwa sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sedangkan 18% penabung menyimpan di sektor informal seperti arisan, klub tabungan, dan kelompok dana bergulir, sementara 32% lainnya tidak memiliki tabungan.

Berkembang maju suatu negara atau daerah sangat ditentukan dengan adanya investasi swasta yang sangat diharapkan guna memperbaiki *income per capita* (pendapatan per kapita) masyarakat akan meningkat dan stabil. Apabila perkembangan iklim investasi swasta kedepan akan memiliki prospek lebih baik, otomatis menurunkan angka kemiskinan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi meningkat, maka perluasan lapangan kerja tercipta sehingga adanya terjadi penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang merata dan angka kemiskinan turutn.

Kemajuan investasi swasta terhadap kemiskinan secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan sebagai pilar pembangunan ekonomi suatu daerah. Investasi merupakan salah satu pilar yang fundamental

pembangunan ekonomi. Investasi swasta memainkan peranan penting



dalam proses pertumbuhan dalam mengembangkan perekonomian (Jongwanich dan Kohpaibon, 2008).

Melalui investasi swasta, arus modal yang digunakan untuk perbaikan usaha dan membangun usaha yang baru dapat meningkatkan kesempatan kerja, mendukung proses produksi, transfer teknologi, akses pasar internasional melalui produk-produk ekspor, serta pengendalian mutu. Investasi swasta adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di LDCs, meningkatkan tingkat pertumbuhan investasi swasta menjadi target yang diinginkan untuk mencapai agenda pembangunan pasca 2015. Untuk tujuan ini, pembuat kebijakan perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan menghilangkan hambatan terhadap investasi. Mereka perlu menemukan mekanisme untuk menarik investor swasta (PBB, 2014a dan PBB, 2014b).

Investasi swasta secara independen variabel pada variabel dependen pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu variabel pengaruh yang mempengaruhi investasi swasta, yaitu GDP/ PDB riil/ Pertumbuhan ekonomi/ Pendapatan Asli positif berpengaruh terhadap pembangunan investasi swasta. Seperti Augustine (2014) dan Assa and Abdi (2012), GDP berpengaruh terhadap investasi swasta. GDP menunjukkan suatu peningkatan penjualan dan laba. Ini akan meningkatkan privasi ekspansi investasi dalam perekonomian.

Menurut Basha dan Debela (2015), Jalloh (2002), Kaputo (2011), Ouattara (2004), Molapo dan Damane (2015) dan Mbaye (2014), menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP/ Pendapatan riil. Sebaliknya, Adugna (2013) juga mengidentifikasi bahwa PDB per kapita berpengaruh positif terhadap investasi swasta. PDB riil per kapita



lebih tinggi dengan asumsi efektif meningkat terhadap barang dan jasa, dengan demikian mendorong investasi swasta. Berdasarkan semua studi, output (pendapatan nasional) positif meningkatkan investasi swasta.

Investasi dalam literatur biasanya digunakan untuk merujuk pada peningkatan persediaan modal (Reungsri,2010). Perbedaan dalam literatur antara lain investasi modal tetap, investasi modal manusia dan pembelian aset keuangan seperti saham dan obligasi yang menggunakan istilah investasi. Perbedaan lebih lanjut antara peningkatan stok modal publik dan investasi swasta.

Studi penelitian menyelidiki dampak investasi publik difokuskan pada pengembangan negara-negara berdasarkan data kualitas investasi secara luas dan lebih baik. Sebagian kecil penelitian lebih fokus pada negara berkembang terutama keterbatasan ketersediaan data dan kualitas. Straub, (2008) berpendapat bahwa di negara-negara berkembang infrastruktur memiliki masalah akut dan kebijakan pokok. Jika investasi publik dan investasi swasta bersifat komplementer, maka investasi publik akan dominan pada investasi individual. Dengan demikian upaya untuk menambah stok modal publik melalui investasi publik akan menyebabkan peningkatan investasi swasta karena sektor swasta berusaha meningkatkan stok modalnya.

Efek *crowding-in* dapat muncul dalam berbagai cara, misalnya investasi publik diinfrastruktur seperti jalan, jalan raya, pendidikan, saluran pembuangan air dan kapasitas listrik pembangkit untuk mengurangi biaya produksi pada sektor swasta. Ini bisa terjadi dengan cara mengurangi biaya logistik dan (atau) memungkinkan substitusi biaya tinggi/rendah investasi efisien untuk investasi

urah/lebih efisien, misalnya substitusi investasi generator listrik untuk investasi mesin produktif. Pada gilirannya pengurangan biaya sektor swasta



meningkatkan produktivitas marjinal modal swasta, meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan pada modal swasta dan dengan demikian mengarah ke peningkatan sektor investasi swasta karena meningkatnya ekspektasi laba. Misalnya jaringan jalan lebih baik agar dapat mengurangi biaya pembangunan sektor swasta pabrik baru atau pengangkutan peralatan berat (Boopen dan Khadaroo, 2006).

Jika *crowding-out* terjadi, maka setiap efek positif dari investasi publik pada investasi swasta terdapat efek buruknya. Hal ini menjadi kasus dimana investasi publik melalui peningkatan perpajakan distorsi. Distorsi perpajakan memberikan insentif menghindari pajak atau mengurangi tingkat pengembalian yang diharapkan dan ekspektasi laba setiap proyek investasi. Efek yang sama, bisa timbul di mana investasi publik dibiayai melalui peningkatan pinjaman pasar keuangan domestik. Hal ini mengurangi aliran dana investasi yang tersedia untuk investasi sektor swasta dan mengarah pada peningkatan biaya pinjaman melalui suku bunga tinggi dalam perekonomian domestik. Namun, saluran yang tepat terjadi dimana, hasil bersihnya adalah investasi publik berdampak buruk pada investasi swasta yang mengarah ke efek *crowding-out* (Boopen dan Khadaroo, 2006).

Agenor *et.al* (2005) berpendapat bahwa arah dan kekuatan *crowding-in* dan efek *crowding-out* sangat bervariasi pada lingkungan spesifik di mana investor swasta beroperasi. Dengan demikian hubungan antara investasi publik dan salah satu investasi substitusi atau *crowding-out* dalam jangka pendek dan komplementaritas atau *crowding-out* dalam jangka panjang, tergantung pada produktivitas investasi. Dengan demikian penggunaan pemodelan dinamis

mempelajari hubungan antara investasi publik dan investasi swasta menguntungkan.



Dalam hal pengukuran investasi publik melalui investasi dan sumber daya manusia (pengeluaran pendidikan dan kesehatan), setiap kendala untuk investasi swasta yang ditimbulkan oleh modal manusia dapat dengan mudah diatasi, dengan menggunakan kata kerja ekspatriat, melayani untuk melemahkan hubungan apa pun antara investasi publik dan investasi swasta. Sejumlah penelitian telah menetapkan bahwa untuk membuat kesimpulan mengenai produktivitas sumber daya manusia berdasarkan infrastruktur investasi (seperti GDFI). Misalnya studi seperti Galiani *et.al* (2005) telah ditetapkan bahwa infrastruktur yang lebih baik mendorong peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dalam jangka pendek dengan persediaan modal manusia lebih efektif. Dalam jangka panjang, efek ini menginduksi investasi tambahan dalam modal manusia.

Ukuran lain yang digunakan dalam literatur adalah investasi publik dalam infrastruktur (GDFI). Ini terdiri dari nilai moneter tambahan pada persediaan modal tetap dalam jangka waktu tertentu. Indikator pengukuran digunakan studi terbaru dengan model VAR (Khan 1996; Ghali,1998; Badawi, 2003; Ghani dan Din, 2006; Brinca, 2006; Naqvi, 2002). Studi-studi tersebut dipilah GDFI oleh sektor publik dan swasta. Namun masalah pendekatan semacam itu adalah ketersediaan data. Data investasi publik dan swasta jarang dipilah kebanyakan negara. Dalam kasus-kasus di mana ia terpilah, tidak tersedia lama periode waktu. Namun periode waktu mendekati 30 tahun dianggap cukup disastra (Badawi, 2003; Naqvi, 2002; Brinca, 2006; Ghani dan Din, 2006).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan

si, dana untuk membiayai investasi berasal dari tabungan domestik
olis, 2006). Namun berhubung dengan keterbatasan sumberdaya



finansial, maka pemerintah terlebih dahulu melakukan investasi publik terutama dalam bentuk penyediaan *Social Overhead Capital* (SOC) berupa jalan, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan, pendidikan dan sebagainya untuk mendorong investasi swasta dalam bentuk *Direct Productive Activities* (DPA) atau kegiatan produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan seperti ini oleh Hirschman disebut *Inbalance Through SOC-DPA* (Yotopoulos dan Nugent, 1985 ; Jhingan, 1990).

Pertumbuhan ekonomi sebagai *necessary condition* (diharuskan) untuk menurunkan angka kemiskinan dan *sufficient condition* (tidak diharuskan) bisa ditangguhkan dalam aspek pembangun ekonomi di bidang infrastruktur pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi naik, karena ada kebijakan ekonomi pemerintah memberikan peluang kepada investor untuk berinvestasi untuk membuka lapangan pekerjaan, maka terjadi penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

Ada tiga cara mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara. *Pertama*, pendekatan pendapatan, mengukur pendapatan dihasilkan di suatu negara dengan menyimpulkan bahwa semua pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk faktor-faktor produksi. *Kedua*, pendekatan pengeluaran, mengukur pengeluaran akhir barang dan jasa mewakili jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan sumber daya seperti upah, sewa dan keuntungan. *Ketiga*, dengan pendekatan produksi, pertumbuhan ekonomi dihitung sebagai penjumlahan semua barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Mempertimbangkan pendekatan ini, maka penelitian ini mengadopsi ekspresi GDP, mengukur output dalam suatu negara dalam istilah logaritma. Dianggap

cocok *Pertama*, pendekatan PDB per kapita terutama berkaitan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan sementara, GDP GR berkaitan



dengan GDP perubahan dari tahun sebelumnya hingga tahun berikutnya dalam bentuk persentase. *Kedua*, Model Solow-Swan, output (y) negara dijelaskan oleh GDP. Dengan demikian, pertumbuhan PDB digunakan sebagai *proxy* pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini telah digunakan oleh penelitian seperti Antwi dan Zhao (2013), Athukorala (2003), Egbo (2012) dan Louzi and Abadi (2011).

Ravallion (1997), Son dan Kakwani (2003), dan Bourguignon (2004) melakukan review hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan dan kemiskinan, dan mencatat bahwa dampak pertumbuhan terhadap penurunan angka kemiskinan hanya terjadi ketika ketimpangan relatif tinggi (*high inequality*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi terjadi keseimbangan ketimpangan pendapatan karena para pencari kerja (penduduk bekerja) banyak terserap di pasar kerja sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya kemiskinan.

Hal ini berdampak pada daerah-daerah yang mempunyai tingkat ketimpangan yang sedang, apalagi rendah, dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan relatif tidak signifikan. Hasil ini dapat pula diinterpretasi bahwa untuk tingkat pertumbuhan berapapun, semakin rendah ketimpangan, semakin besar terjadinya penurunan kemiskinan. Namun ketika ketimpangan pendapatan cenderung tetap stabil sepanjang waktu, pertumbuhan tetap diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, setidaknya sampai pada taraf tertentu.

Kemajuan ekonomi menjadi faktor penting dalam pembangunan negara-negara. Secara umum, pembangunan ekonomi mencakup pertumbuhan (output, dan sumber daya) dan pertumbuhan ekonomi intensif, yaitu peningkatan produktivitas, implementasi inovasi, dan penciptaan lapangan



pekerjaan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat didefinisikan sebagai mobilisasi peningkatan sosial, keuangan, organisasi, fisik, dan sumber daya alam meningkatkan kualitas persaingan produk, dan meningkatkan kuantitas masyarakat. Akibatnya, banyak faktor yang berbeda dapat menentukan pertumbuhan ekonomi antar negara (Ginevicius & Podvezko 2006; Lankauskiene & Tvaronaviciene 2011; Tvaronaviciene & Lankauskiene 2011).

Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja (*demand for labour force*), dimana kesempatan kerja sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja. Semakin meningkat kegiatan pembangunan maka akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menjadi sangat penting karena semakin besar kesempatan kerja bagi tenaga kerja maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik, dan sebaliknya. Di sisi lain, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tinggi dalam waktu cepat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas maka akan menyebabkan timbulnya pengangguran.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam usaha perekonomian suatu bangsa terhadap kemiskinan baik secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Usaha yang dimaksud yaitu penyediaan lapangan kerja yang cukup agar dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Salah satu tema utama bidang ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja

diengaruhi oleh beberapa faktor antara lain upah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan pendapatan nasional. Apabila



faktor-faktor tersebut mengalami perubahan maka akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja.

Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja akan menimbulkan *gap* yang disebut pengangguran. Pengangguran ini pada akhirnya akan membawa dampak ketidakstabilan ekonomi yang akan berimbas pada ketidakstabilan di bidang kehidupan lainnya.

Sektor informal meliputi semua usaha komersial dan nonkomersial, yang tidak memiliki struktur formal dalam organisasi dan operasinya. Usaha-usaha ini tidak terdaftar, tidak membayar pajak dan tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini berarti, usaha-usaha tersebut tidak mempunyai akses kredit dan asuransi formal, dan tidak bisa berharap mendapatkan perlindungan undang-undang. Sektor informal mempunyai aturanaturan budaya sendiri, hukum dan kecakapan terapan tradisional, nilai dan pola sosial, cara-cara bertansaksi dan berproduksi, sistem hubungan sosial dan kontrol sosialnya sendiri (Munkner dan Walter, 2001 : 127).

Konsep sektor informal pertama kali muncul di dunia ketiga, yaitu ketika dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. Makalah Keith Hart (Gilbert and Gugler, 1996 : 94-96) memperkenalkan sebuah terminologi baru yang membedakan antara sektor informal dengan sektor formal. Berdasarkan penelitiannya terhadap pendapatan keluarga di kota Accra dan Gana, dia menemukan bahwa terdapat variasi yang besar dalam hal tersedianya peluang pendapatan legal maupun illegal pada kelompok miskin perkotaan.

Logi Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diasikan oleh ILO. Misi tersebut berpendapat, bahwa sektor informal telah



memberikan tingkat ongkos yang rendah, padat karya, barang dan jasa yang kompetitif, dan memberikan rekomendasi agar pemerintah Kenya mendorong sektor informal tersebut.

Ketimpangan pendapatan rendah berpengaruh terhadap kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan dan kemiskinan memiliki hubungan secara signifikan (Litchfield 1999) menyatakan dalam penelitiannya bahwa, ketimpangan berdampak pada kemiskinan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi; dan juga beberapa ukuran kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Gender (GDI) memasukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan secara rinci pada tinjauan pustaka.

Kerangka teoritis untuk menguraikan teori-teori utama tentang ketimpangan pendapatan. Terutama teori Kuznets tentang ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dimana, konsep utama untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan pembangunan dalam kerangka teori. Jadi, indikator pembangunan manusia dan ekonomi, dimana indeks pembangunan manusia dan indeks PDB dijelaskan secara lebih rinci. Fungsi koefisien Gini, merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara. Hipotesis Kuznets dirangkum oleh Piketty dijelaskan bahwa, "pada tahap awal pembangunan ekonomi minoritas sebagai keuntungan baru pada proses industrialisasi. Sementara tahap pembangunan yang lebih maju, ketimpangan menurun sebagai akibat besar populasi yang diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi '(Piketty, 2014).

Keseimbangan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah provinsi

merata, salah satunya yakni tercipta kesempatan kerja secara merata modal manusia yang dimiliki masing-masing daerah provinsi cukup



signifikan. Apabila terjadi tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi antar daerah provinsi, karena modal manusia dengan tingkat produktivitas kerja pun berbeda pada setiap daerah di kawasan timur Indonesia sepanjang dekade.

Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada era kabinet Indonesia kerja, dimana pemerintah masih menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan lima tahun depan.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah masing-masing serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya

menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.



Booth and Me Cawley (dalam Moeljarto T, 1993) menyatakan bahwa, banyak negara memang ada terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan.

Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan karakteristiknya lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau ketidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia (*basec need*). Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya asset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah di KTI.

Keuangan inklusif dan investasi swasta menjadi urgen (penting) karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia, lebih khusus penduduk di KTI yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal dan nilai investasi dalam negeri dan luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau.

Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis

memperluas keterlibatan sektor keuangan. Selain itu, pihak swasta juga melihat bahwa terdapat celah pasar yang sangat besar dari penduduk



Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan bila mereka dapat diraih lewat berbagai strategi yang inovatif. Hal ini dikarenakan pasar keuangan merupakan jantung perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat (Hannig dan Jansen, 2010).

Secara konseptual, teori keuangan inklusif yang dapat dijabarkan dan teori investasi swasta yang dapat pula dijelaskan secara terstruktur. Sehingga topic ini dipilih sebagai sebuah tema yang penting untuk dilakukan studi secara mendalam. Diperlukan sebuah studi untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Untuk studi yang mendalam tersebut, tema ini diangkat dalam satu judul disertasi: **“Keuangan Inklusif, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, timbul keinginan untuk mengetahui lebih jauh, bagaimana keuangan inklusif dan investasi swasta berpengaruh langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah keuangan inklusif berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara

lengkap maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi,



penyerapan tenaga kerja, ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.
4. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.
5. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengukur, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh keuangan inklusif terhadap kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia
2. Untuk mengukur, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia
3. Untuk mengukur, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung



melalui penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia

4. Untuk mengukur, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia
5. Untuk mengukur, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dan instansi setempat maupun pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan fiskal dan moneter tentang masalah kemiskinan
2. Memberikan kontribusi, melalui metode induktif pada pengembangan teori ekonomi di bidang ekonomi fiskal dan moneter, khususnya masalah investasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan
3. Memberikan dorongan bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan kajian terkait tentang masalah kemiskinan.

